

**PENGARUH KEEFEKTIFAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**SKRIPSI**

Oleh

**RAHMI AWALIYAH  
NIM 105 730 5235 15**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**PENGARUH KEEFEKTIFAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**SKRIPSI**

**RAHMI AWALIYAH**

**NIM 105730523515**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Penelitian pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah “**pengaruh keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara**” ini kupersembahkan kepada bapak, Ibu dan Saudaraku, terimakasih atas segala kasih sayang serta dukungan spiritual dan material kalian.

**FASTABIQUL KHAIRAT**

**MOTTO HIDUP**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara"

Nama Mahasiswa : RAHMI AWALIYAH  
No. Stambuk/NIM : 105 730 5235 15  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Abdul Rahman Rahim,S.E.,MM Dr.Ismail Badollahi,S.E.,M.Si,Ak.CA.CSP  
NIDN: 09 2508 6302 NIDN: 09 1505 8801

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi,S.E.,M.Si,Ak.CA.CSP  
NBM : 107 342B



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **RAHMI AWALIYAH, NIM 105730523515**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0104 Tahun 1441 H/ 2019M, Tanggal 13 Safar 1441 H/ 12 Oktober 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Safar 1441 H  
12 Oktober 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  1. Dr. Ismail Badollahi, SE., M. Si. Ak. CA. CSP
  2. Abd Salam, SE., M. Si. Ak. CA. CSP
  3. Andi Arman, SE., M. Si. Ak. CA
  4. Samsul Rizal, SE., MM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Awaliyah  
Stambuk : 105730523515  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Safar 1441 H  
12 Oktober 2019 M


Yang membuat pernyataan,

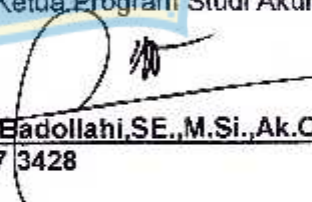
  
RAHMI AWALIYAH

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Ismail Rasulleng, SE., MM  
NBM : 908078

  
Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP  
NBM : 107 3428

## ABSTRAK

**RAHMI AWALIYAH, Tahun 2019 Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara,** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abdul Rahman Rahim Dan Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diolah menggunakan program windows spss 24.0. Teknik analisis data yakni analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu  $11,667 > 0,2306$  dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Kata Kunci : *keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan*



## ABSTRACT

**RAHMI AWALIYAH, 2019** The Effect of Effectiveness of Government Accounting Standards on the Quality of Regional Government Financial Statements in the Regional Financial and Asset Management Agency of North Luwu Regency, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Abdul Rahman Rahim and Ismail Badollahi.

*This study aims to determine the effect of the Effectiveness of Government Accounting Standards on the Quality of Regional Government Financial Statements in the Regional Financial and Asset Management Agency of North Luwu Regency. This type of research used in this research is quantitative research. Data is processed using the Windows SPSS 24.0 program. The data analysis technique is simple regression analysis.*

*The results showed that the effectiveness of Government Accounting Standards had a positive and significant effect on the quality of government financial reports on the Regional Financial and Asset Management Agency of North Luwu Regency. This is indicated by the value of t-test that is greater than t-table that is  $11.667 > 0,2306$  with a significant level of 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). For the sake of increasing financial information, the government will be able to become the basis for decision making in the government and also realize transparency and accountability.*

*Keywords: effectiveness of Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements*





## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ali Misbahuddin dan Ibunda tercinta Sekinah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan Adik-adikku tercinta Hasnani Dan Muh.Ikhwanuddin dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK. CA. CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK. CA. CSP, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang tidak bisa saya tulis satu persatu terima kasih atas waktunya selama kurang lebih empat tahun.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 terkhusus kepada kelas Akuntansi 15.B yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Makassar, Oktober 2019

RAHMI AWALIYAH

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b>	
<b>HALAMAL JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK INDONESIA</b> .....	vii
<b>ABSTRAK INGGRIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
1. Manfaat teoritis .....	4
2. Manfaat praktis .....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Standar Akuntansi Pemerintahan .....	5
B. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010 .....	6
C. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) .....	9
D. Laporan keuangan sektor publik.....	10
E. Kualitas Laporan Keuangan .....	13
F. Tinjauan Empiris .....	14
G. Kerangka Konsep .....	19
H. Hipotesis Penelitian .....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....	21
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	25

E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Teknik Analisis .....	27
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	30
B. Hasil Penelitian .....	43
C. Pembahasan .....	53
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Penelitian terdahulu .....	16
Tabel 3.2	Operasional variabel .....	22
Tabel 3.3	Pemberian skor jawaban .....	24
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Responden .....	43
Tabel 4.2	Pendidikan Terakhir Responden .....	44
Tabel 4.3	Usia Responden .....	45
Tabel 4.4	Lama bekerja .....	46
Tabel 4.5	Klasifikasi Skor Jawaban Variabel Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) .....	46
Tabel 4.6	Klasifikasi Skor Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) .....	47
Tabel 4.7	Uji Validitas .....	50
Tabel 4.8	Uji Reabilitas .....	51
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) Model Summary .....	52
Tabel 4.10	Uji T .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka konsep .....	20
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	33



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beberapa pulau dengan berbagai budaya, sosial dengan kondisi perekonomian yang berbeda sehingga membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga Daya saing pada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat terpenuhi melalui otonomi daerah dengan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga dapat diraih dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan berada pada pemerintah daerah. Pemerintah di Indonesia juga telah menerapkan salah satu peraturan pemerintah daerah yakni Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sector publik yang memuat rumusan secara terperinci mengenai elemen-elemen standar akuntansi. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu Negara akan sangat berpengaruh pada peraturan undang-undang yang berlaku di suatu Negara yang bersangkutan.

Di Indonesia sistem akuntansi pemerintah yang bergerak dalam standar akuntansi pemerintah yang disusun dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 dimana di atur dalam pasal 7 PP Nomor 71 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penerapan SAP Berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan penerapan SAP berbasis akrual.

Bagi Setiap keuangan daerah, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi pemerintah memberikan tantangan yang baru dalam



meningkatkan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan yang akan dihadapi yaitu kemampuan pihak pengawas dalam memberikan kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya di harapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Adapun Tantangan yang juga dihadapi oleh dinas pendapatan daerah adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target marko pembangunan daerah, sehingga di perlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya.

Berbicara mengenai standar akuntansi pemerintah tentu sangat erat kaitanya dengan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan untuk itu sangat tidak heran ketika banyak sekali peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai persoalan tersebut. Dua diantara banyak peneliti yang pernah membahas lebih jauh mengenai persoalan ini adalah 1) penelitian yang dilakukan oleh Eka Danofi R (2013) Perbedaan antrara peneliti ini dengan penelit terdahulu yaitu metode pengukuran efektivitas dan objek penelitian yang lebih luas . dari penelitian tersebut memaparkan bahwa adanya pemahaman yang baik. penerapan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. 2) Nurlaila (2014). Menunjukkan bahwa hasil dari efektivitas penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah.

Dari dua diantara banyaknya peneliti yang dilakukan sebelumnya mengenai keterkaitan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan, maka penulispun juga tertarik untuk melakukan penelitian dengan persoalan yang sama tetapi lokasi yang berbeda. Adapun judul penelitian yang penulis ajukan adalah **“PENGARUH KEEFEKTIFAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara” ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan dengan sewajarnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menambah ilmu pengetahuan dengan adanya teori-teori yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi penulis selanjutnya
- b. Bagi kaum akademisi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pemikiran yang dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu akuntansi dimasa mendatang

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan untuk melihat serta menganalisis Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- b. Bagi peneliti sendiri di harapkan menjadi sarjana untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh keefektifan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan pengelola keuangan dan aset Daerah
- c. Bagi devisi terkait dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh keefektifan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan pengelola keuangan dan aset Daerah

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang di tunjukkan untuk publik.

Akuntansi sektor publik yaitu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. selain itu, ada pula yang menjalankan aktifitas lainnya seperti yayasan, lembaga-lambaga keagamaan, lsm, partai politik, rumah sakit dan lembaga pendidikan. (V. Sujarweni, 2015)

#### **1. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik bersifat memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik sehingga menimbulkan adanya karakteristik khusus yang menjadi pembeda antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi perusahaan. perbedaan sifat dan Karakteristik Akuntansi

tersebut disebabkan karna adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. (Yoyo sudaryo, Dkk ,2017,20)

## **2. Fungsi Akuntansi Sektor Publik**

Fungsi Akuntansi sektor publik adalah akuntabilitas pertanggung jawaban pengurusan keuangan publik (public accountability) dimana akuntansi sektor publik secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang di butuhkan.(Yoyo sudaryo, Dkk ,2017,26)

## **3. Pengertian Akuntansi Keuangan Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik seringkali akuntansi sektor publik disalah artikan dengan akuntansi pemerintahan walaupun dalam kenyataanya dimaksud sektor publik tidaklah seluruhnya berkaitan dengan pemerintah. sebaliknya dalam pandangan sektor publik maka pemerintah adalah bagian dari sektor publik. (Bambang Pamungkas,2013)

## **B. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP 71 Tahun 2010**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Di tetapkan dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagai pengganti peraturan pemerintah tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) perubahan tersebut ditur oleh mentri keuangan setelah mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan.

Perubahan PSAP Juga disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam penyusunan SAP Juga disampaikan oleh KSAP Kepada menteri keuangan menteri keuangan menyampaikan usulan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada badan pemeriksa keuangan untuk mendapat pertimbangan.

SAP Berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di nyatakan dalam bentuk PSAP Dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (peraturan SAP pasal 4 ayat(1,2,3,4). Pemerintah menyusun sistem informasi pemerintahan(SIAP) yang mengacu pada SAP, Yang Dilakukan oleh :

- a) Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat yang di atur dengan menteri keuangan dan mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
  - b) Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur oleh gubernur/bupati/wali kota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
1. Tujuan dari standar akuntansi pemerintahan yaitu:
- a) SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan suatu laporan keuangan pemerintah.
  - b) SAP juga disusun untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu Negara.
  - c) SAP juga Berlaku untuk pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, standar akuntansi pemerintahan juga bertujuan untuk:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan suatu sumber daya dalam mencapai tujuan.
  2. Mempermudah fungsi perencanaan dan pengelolaan, serta pengendalian asset kewajiban dan ekuitas dana perusahaan.
  3. Dapat memberikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders.
  4. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
2. Manfaat dari standar akuntansi pemerintahan yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintahan dilingkup pemerintahan, baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta dinas-dinasnya. Penerapan SAP ini juga diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas suatu laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Maka dari itu keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di sebuah pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

### **C.Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)**

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual , SAP Berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konsptual akuntansi pemerintah PSAP Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimana dijasikan sebagai ketentuan yang dipahami serta ditaati oleh pembuat penyusunan standar akuntansi oleh penyelenggara dan pelaporan akuntansi keuangan dalam melakukan kegiatannya serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan pelaporan keuangan pemerintah.

#### **a. Basis akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

#### **b. Prinsip nilai historis**

Aset ini dicatat sesuai dengan pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sesuai dengan nilai wajar. Prinsip nilai historis ini lebih dapat menjamin dibandingkan dengan penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat di verifikasi.



c. Prinsip realisasi

Prinsip realisasi ini merupakan pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun untuk membayar hutang pada belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip periodisitas

Kegiatan ini merupakan kegiatan akuntansi seta pelaporan keuangan yang harus di bagi menjadi berbagai periode.

e. Prinsip konsistensi

Akuntansi yang sama di terapkan pada kejadian yang sama dalam periode satu ke periode yang lain.

f. Prinsip substansi menggungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang memang harus disajikan.

g. Prinsip penyajian wajar

Faktor pertimbangan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

h. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan ini menyajikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut informasi bisa didapatkan melalui lembar laporan keuangan atau pada CALK.

#### **D. Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik digunakan untuk

memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.

Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi:

a) Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah.
3. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah.

c) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat maupun daerah selama periode tertentu.

d) Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan juga disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebelum dilapor kepada DPRD/Masyarakat laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Bambang Pamungkas, 2013,79 Laporan Keuangan mempunyai 5 Tujuan yaitu :

- a) Laporan keuangan berguna dalam menyediakan informasi dalam menentukan dan memperkirakan aliran saldo dan persyaratan kebutuhan sumber daya keuangan organisasi dalam jangka pendek
- b) Laporan keuangan berguna dalam menyediakan informasi untuk menentukan dan memperkirakan kondisi ekonomi unit organisasi dan prubahannya
- c) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk memonitor kinerja yang telah di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan persyaratan kontrak dan perjanjian lainnya
- d) Menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran dan berguna pula untuk memperkirakan pengaruhnya terhadap perolehan dan alokasi sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan operasional yang tertentu

- e) Menyediakan informasi yang bermanfaat untuk melakukan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

#### **E. Kualitas laporan keuangan**

Menurut Parmadi (2013:49) menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu sebuah daftar financial entitas ekonomi yang dirangkai secara sistematis oleh seorang akuntan pada suatu akhir periode. Laporan keuangan juga harus memiliki kualitas informasi atau karakteristik kualitas. Sehingga dapat memberikan informasi yang berkualitas bagi para pemakainnya seperti:

- a. Dapat dipahami. Kualitas yang sangat penting harus memberikan sebuah informasi yang mudah ditampung dan mudah dipahami oleh pengguna dalam sebuah laporan keuangan.
- b. Relevan. informasi yang diterima juga harus relevan agar dapat memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan.
- c. Keandalan. Informasi yang diterima juga harus handal, dimana informasi dikatakan andal apabila jauh dari hal-hal yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Dapat dibandingkan dimana pemakai harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan ini disusun agar dapat memberikan informasi tentang posisi harta, hutang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya.

Bentuk-bentuk laporan keuangan khususnya laporan keuangan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

2. Neraca

Yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

3. Laporan arus kas

Yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas suatu perusahaan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Yaitu catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.

## F. Tinjauan Empiris

Sebelumnya ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

Dhedy Triwardana dengan judul penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Dengan hasil penelitian hasil uji validasi data yang digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pertanyaan hasil uji normalitas grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas, hasil uji multikolinieritas nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas, hasil uji heterokedastistas terlihat bahwa titik-titik membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. (Dhedy triwardana ,2017).

Nurlaila, dengan judul pengaruh Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten enrekang) hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nurlaila 2014).

Purwaniati Nugraheni imam subaweh (2008) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan hasil menunjukkan tanpa penerapan standar akuntansi di inspektorat jendral penggetahuan penggellola UAPPA E1 dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional sebesar 46.650 setiap penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi di inspektorat jenderal penggetahuan penggelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh

meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, 0.252 satuan, dan 0.399 satuan secara berturut-turut. Artinya pengaruh standar akuntansi di inspektorat jenderal pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang.

Nurul Fahmi dengan judul pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dengan hasil menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu  $2,371 > 2,048$  dengan tingkat signifikan sebesar 0,025 ( $0,025 < 0,05$ ). Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Ade Astalia Pratiwi<sup>1</sup> Jullie J. Sondakh<sup>2</sup> Lintje Kalangi<sup>3</sup> (2014) dengan judul Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan dengan Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan menyusun komponen laporan keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK.

Table 3.1

## Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Dhedy Triwardana(2017)	pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan , penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD	hasil uji validasi data yang digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pertanyaan hasil uji normalitas grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karna asumsi normalitas, hasil uji multikolinieritas nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas, hasil uji heterokedastistas terlihat bahwa titik-titik membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.
2	Nurlaila(2014)	pengaruh Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten enrekang)	hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3	Purwaniati Nugraheni imam subaweh (2008)	pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	hasil menunjukkan tanpa penerapan standar akuntansi di inspektorat jendral pengetahuan penggellola UAPPA E1 dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan



			<p>inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional sebesar 46.650 setiap penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi di inspektorat jenderal pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, 0.252 satuan, dan 0.399 satuan secara berturut-turut. Artinya pengaruh standar akuntansi di inspektorat jenderal pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang.</p>
4	Nurul fahmi(2017)	<p>Pengaruh epektitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pendapatan daerah Sulawesi selatan</p>	<p>hasil menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu <math>2,371 &gt; 2,048</math> dengan tingkat signifikan sebesar <math>0,025 &lt; 0,05</math>. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan</p>

			dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
5	Ade Astalia Pratiwi <sup>1</sup> Jullie J. Sondakh <sup>2</sup> Lintje Kalangi <sup>3</sup> (2014)	Analisis Penerapan Sak tetap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan	Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan menyusun komponen laporan keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK.

### G. Kerangka Pikir

Berdasarkan dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemaerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah.

Hal ini juga bersifat wajib bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk meningkatkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah

pusat maupun daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitasnya harus ada penyelenggaraan akuntansi pemerintah

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik serta berkualitas suatu entitas harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya.

**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pikir**



**H. Hipotesis**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka saya sebagai peneliti tertarik dengan judul ini maka hipotesis pada penelitian ini yaitu diduga bahwa keefektifan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian adalah suatu proses menemukan yang data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek yang akan diteliti, sehingga merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam penelitian demi mendapatkan data-data yang akurat dan relevan sesuai dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

##### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama enam hari yaitu tanggal 16 sampai dengan 21 Agustus 2019 dengan membagikan kuisioner pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### C. Definisi operasional Variabel dan pengukuran

##### 1. Definisi operasional variabel

Menurut Sugiyono dalam Husein Umar (2014:47) menyatakan bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara yang satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Variabel independen (bebas) adalah keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dengan variabel X. dimana Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu prinsip akuntansi yang di terapkan untuk menyusun dan menyajikan suatu laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaporan keuangan pemerintah terdapat beberapa konseptual yaitu basis akuntansi, nilai historis, substansi menggungguli bentuk perioditas konsistensi pengungkapan lengkap serta penyajian wajar dimana responden diminta untuk memilih salah satu daripada setiap pertanyaan yang di praktekan oleh instansi tersebut maka berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa keefektifan standar akuntansi pemerintahan afektif atau rendah.
- b. Variabel dependen (terkait) adalah kualitas laporan keuangan yang dinyatakan dengan variabel Y. Laporan yang berkualitas dapat diukur dari berbagai dimensi antara lain: andal, releval, dapat dibandingkan serta mudah dipahami dari berbagai dimensi tersbut mengandung indicator pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka lihat selama dalam lingkungan pemerintahan berdasarkan jawaban dari responden maka dapat ditentukan bahwa laporan keuangan berkualitas atau tidak berkualitas

Tabel 3.2

## Operasional variabel

Variabel	Aspek	Indikator	Skala
Variabel X:	Basis	1. Basis akrual	Ordinal
Keefektifan	Nilai Historis	1. Penilaian aset	Ordinal
Standar Akuntansi Pemerintahan	Substansi mengungguli	1. Penyajian transaksi secara wajar	Ordinal
	Periodisitas	1. periode pelaporan	Ordinal
	Konsistensi	1. penerapan metode akuntansi	Ordinal
	Pengungkapan	1. kelengkapan informasi	Ordinal
	Penyajian laporan keuangan	1. dalam Penyajian laporan realisasi anggaran terdapat laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan	Ordinal
Variabel Kualita Laporan Keuangan Pemerintah	Relevan	1. memiliki manfaat umpan balik 2. memiliki manfaat prediktif	Ordinal
	Andal	1. tidak mengandung informasi yang menyesatkan 2. penyajian jujur	Ordinal
	Dapat dipahami	1. dapat dibandingkan dengan 2. mengandung pengetahuan	Ordinal

Sumber : PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

Dalam suatu operasi variabel semua menggunakan skala ordinal dimana skala ordinal merupakan sebuah skala yang tidak hanya mengkategorikan variabel dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perbedaan diantara berbagai kategori.

## 2. Pengukuran variabel

Langkah yang perlu dilakukan untuk mengukur variabel yaitu sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang diambil dari kuisisioner yang diberikan kepada responden dan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk variabel X dan variabel Y.
- b. Kemudian Setelah kuisisioner terkumpul maka data tersebut dikumpulkan menurut kelompok variabel lalu dilanjutkan dengan memberikan skor jawaban dari setiap pertanyaan.
- c. Untuk mendapatkan data tentang Pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi pemerintahan atas laporan keuangan pemerintah daerah maka dibuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan skala likert. Menurut kinear dalam Husein Umar (2014:70) skala likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu
- d. Dalam menghitung besarnya variabel X (Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan) dan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

Dalam skala likert maka jawaban yang satukan dari pertanyaan ataupun pernyataan setiap itemnya akan diberi skor sebagai berikut

**Tabel 3.3**  
**Pemberian skor jawaban**

Kode	Pilihan jawaban	Skor penilaian
SS	Sangat setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang setuju	3
TD	Tidak setuju	2
STS	Sangat tidak setuju	1

- e. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel X dan variabel Y yang akan mengacu pada ketentuan yang ditemukan oleh Husein Umar (2014:164) dimana rentang skala dicari dengan rumus :

$$\text{Rentang skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

Dimana : n = jumlah sampel dan m = jumlah alternatif jawaban tiap item

#### **D. Populasi dan sampel**

##### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek dalam penelitian atau biasa disebut sebagai wilayah generalisasi subjek/objek dalam penelitian dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dimiliki yang juga dijadikan patokan bagi peneliti dalam menarik kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian.



Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2013:119) Populasi juga merupakan keseluruhan gejala/satuan yang akan diteliti Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan unsur secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pimpinan dan staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara kurang lebih jumlahnya 50 orang.

## 2. Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang secara representatif mampu mewakili populasinya. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2013:119) sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Baik sampel yang diambil secara acak maupun yang ditentukan sesuai dengan tema yang ditentukan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang yang merupakan staf yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

## E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu pernyataan tentang Sifat, keadaan tertentu, dan juga sejenisnya yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat menunjang penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Penelitian lapangan (*field reseach*)

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:28) "Penelitian lapangan yaitu penelitian yang akan langsung dilakukan di lapangan

atau kepada responden". Suatu metode atau cara yang digunakan dengan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan bagian keuangan terkait dengan berbagai unsur dalam penelitian yang dilakukan. Serta dengan menggunakan metode angket, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan karyawan atau staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten luwu utara.

Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan langsung oleh peneliti kepada responden. Responden mengisi kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti. Setelah pengisian koesioner yang telah dibagikan, selanjutnya dikumpulkan kembali dan diolah.

#### b. Studi pustaka

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:28) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan unsur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Menganalisanya untuk dijadikan sebagai pembanding sekaligus penguat atas penelitian yang dilakukan. Serta dijadikan sebagai pembanding antara teori yang ada dengan realita yang peneliti peroleh di lapangan.

### F. Tehnik analisis

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik kuantitatif yang digunakan untuk mengguji variabel terkait. Adapun metode statistik yang digunakan yaitu regresi.

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:210) Analisis Korelasi dan Regresi adalah analisis yang mencari hubungan dan pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) merupakan variabel independent dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) merupakan variabel dependent sehingga persamaan regresi linier dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana.

a. Analisis regresi sederhana

Uji analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan tetapi menduga juga besarnya arah hubungan itu serta menduga besarnya variabel dependen jika variabel independen diketahui. Analisis ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Keefektifan standar Akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Persamaan regresi sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X : Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah

a : Konstanta

b : Parameter yang diestimasi untuk X

b. Penguji hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan Koefisien Determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent.

Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat pada r square dan dinyatakan dalam presentase. Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi ( $KD = r^2 \times 100\%$ ) semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi semakin baik.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah singkat

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah di bentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.

5. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan mempertimbangkan strategi yang ada maka Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PUBLIK”

Dalam Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatas terkandung makna sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Luwu Utara yang transparan, yang berarti pengelolaan Keuangan dimana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah bersifat jelas dan terbuka disertai ketersediaan informasi yang lengkap.
2. Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Luwu Utara yang akuntabel, yang berarti pengelolaan keuangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabanya dan di sampaikan secara Transparan kepada masyarakat.
3. Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Luwu Utara berorientasi publik adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini penganggaran yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan dan berkeadilan.

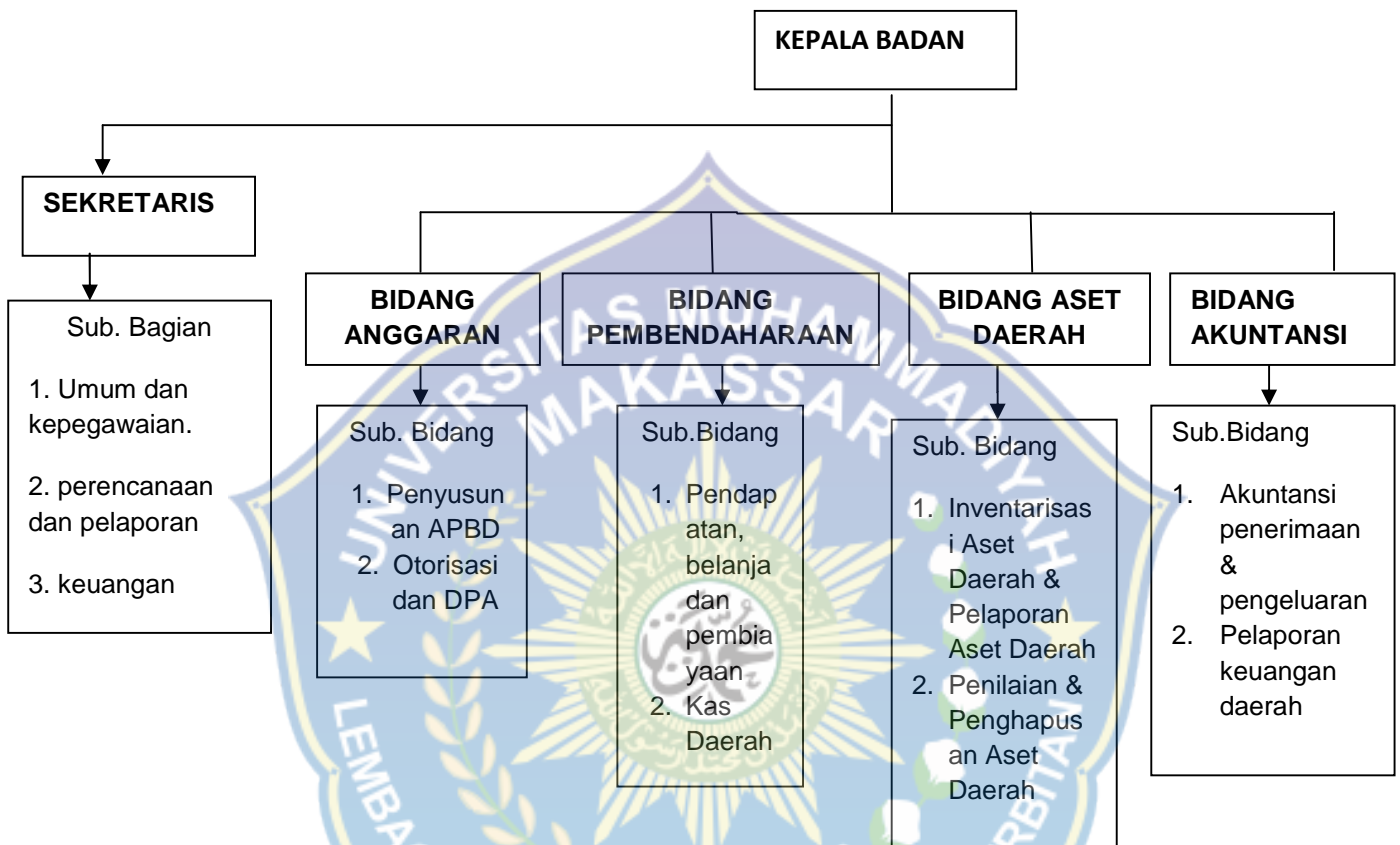
**b. Misi**

Berikut ini dijabarkan tentang misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah antara lain:

1. Mewujudkan penatausahaan dan pengelolaan kas keuangan daerah yang efektif, efisien dan optimal.
2. Mengacu pengelolaan APBD yang berkualitas , berorientasi publik, berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan kinerja pemda Kab. Luwu Utara.
4. Penyajian Informasi keuangan daerah melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat, komprehensif dan akuntabel.
5. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### 3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



#### 4. Tugas Dan Fungsi

##### a. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Badan

- 1) Merumuskan dan menyusun rencana program dan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Mengelola administrasi keuangan dan aset daerah
- 3) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 4) Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait



- 5) Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 6) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
- 7) Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 8) Membina dan mengevaluasi pegawai di lingkungan BPKAD
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Dan Fungsi Sekretaris

Tugas sekretaris tidak jauh dari peran yang dimainkan hanya oleh tugas sekretaris satu organisasi dengan tugas sekretaris organisasi lain belum tentu sama, semua dikembalikan ke AD/ART masing-masing yang mengatur tugas sekretaris.

Tetapi secara umum ada 8 tugas sekretaris dalam organisasi:

- 1) Menjalankan Perintah Pimpinan
- 2) Membantu Pekerjaan Pimpinan
- 3) Penghubung antara Pemimpin dan Anggota
- 4) Penghubung Pemimpin dengan Orang-Orang di Luar Organisasi
- 5) Melakukan Korespondensi Pengarsipan
- 6) Mengatur Jadwal
- 7) Kreatif

c. Tugas, Fungsi dan Bidang Anggaran

Tugas :

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
- 2) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
- 3) Pelaksanaan analisis anggaran daerah.
- 4) Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
- 5) Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah.
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub bidang Analisis Anggaran

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.

Fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran.
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
- d) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
- f) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisis Anggaran.

## 2) Subbidang Perencanaan Anggaran

Tugas :

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.
- c) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
- e) Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.
- f) Penyusunan informasi penganggaran daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.

## 3) Subbidang Pengendalian Anggaran

Tugas :

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah.
- c) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.

d) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.

#### d. Tugas Dan Fungsi Bidang Pembendaharaan

##### Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan verifikasi serta pengesahan dokumen atas tagihan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan;
- 2) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan uang untuk belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 4) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 5) Pelaksanaan penyimpanan uang;
- 6) Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana;

- 7) Pelaksanaan pengelolaan utang daerah;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- 9) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

e. Tugas Dan Fungsi Aset Daerah

Tugas :

Melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.

Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang aset.
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset.
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset.
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

a) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.

### Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset.
- 3) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- 4) Pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan.
- 5) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- 6) Pengurusan status hukum barang daerah.
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.

### b) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

#### Tugas

Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemanfaatan Dan Pengamanan Aset.

#### Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.
- 3) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- 4) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.

- 5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
  - 6) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
  - 7) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
  - 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
- c) Sub bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
- Tugas
- Menyiapkan Bahan Penatausahaan Dan Pengendalian Aset.
- ★ Fungsi
- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
  - 2) Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
  - 3) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
  - 4) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
  - 5) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
  - 6) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki nilai.

- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

f. Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi & Pelaporan

Tugas

Melaksanakan Dan Membina Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Fungsi

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 3) Pelaksanaan Dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah.
- 4) Pelaksanaan Dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
- 5) Pelaksanaan Evaluasi Realisasi Keuangan Daerah.
- 6) Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja Bidang Akuntansi Dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Terdiri Dari :

- a) Subbidang Akuntansi Dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah Dan Evaluasi Realisasi Keuangan Daerah.



### Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- 3) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- 4) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah
- 5) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

### b) Sub bidang Akuntansi dan Evaluasi

#### ★ Tugas

Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

### Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- 3) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- 4) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- 5) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Demografi Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kurang lebih sebanyak 50 eksemplar. untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti.

#### a. Jenis Kelamin

Dekskripsi karakteristik responden menurut jenis kelamin (gender), yaitu pengelompokan responden menurut laki-laki dan perempuan. untuk mengetahui tingkat proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dapat di sajikan melalui tabel 4.1 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	23	46%
Perempuan	27	54%
Total	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah secara keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 50 orang yang merupakan staf bagian keuangan. data tersebut menunjukkan bahwa responden laki-laki sebanyak 23 orang atau 46% dan responden perempuan sebanyak 27 orang atau 54

### b. Pendidikan Terakhir

Dekskripsi pendidikan responden menjelaskan uraian tingkat pendidikan responden, sehingga dalam dekskripsi pendidikan responden maka dapat dikelompokkan yaitu: sma, sarjana dan pascasarjana. untuk lebih jelasnya akan disajikan proporsi presentase responden menurut tingkat pendidikan yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Pendidikan Terakhir Responden**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SMA	7	14%
S1	40	80%
S2	3	6%
Total	50	100%

Sumber : Data Diolah,2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan responden yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan secara langsung didominasi bergelar S1 yaitu sebanyak 40 orang (80%) dan S2 sebanyak 3 orang (6%), dan SMA sebanyak 7 orang(14%). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan lebih tinggi memiliki ilmu dan pemahaman yang lebih luas, yang dalam hal ini pendidikan tertinggi tersebut adalah S1 dan S2 yang mayoritas digunakan jasanya dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Luwu Utara.

### c. Usia Responden

Dekskripsi usia responden menjelaskan uraian tingkat usia responden, sehingga dalam dekskripsi usia responden maka dapat dikelompokkan antara lain usia 19 sampai 35 sebanyak 10 orang, usia 36 sampai 45 sebanyak 32 orang dan usia 46 sampai 51 sebanyak 8 orang, berikut dapat dinyatakan dalam tabel.

**Tabel 4.3**  
**Usia Responden**

Usia	Frekuensi	Persentase
19-35	10	20%
36-45	32	64%
46-51	8	16%
Total	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 10 responden (20%) berusia 19 sampai 35 tahun, dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut merupakan usia yang pemikirannya masih jernih dan secara psikologi cenderung emosional sebagian besar responden yang merupakan penyusun laporan keuangan mayoritas berusia sekitar 36 sampai 45 tahun yaitu sebanyak 32 responden (64%), dimana pada usia tersebut merupakan usia dengan pemikiran yang matang dalam menganalisa dan berani mengambil resiko. Sementara itu, adapun sebanyak 8 responden (16%) berusia 46 sampai 51 tahun, dimana dalam usia tersebut memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Meskipun begitu, penempatan posisi sebagai penyusun laporan keuangan pada instansi pemerintahan, tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Usia hanya sebagai faktor penunjang untuk informasi dari responden.

#### d. Lama Bekerja

Dekskripsi karakteristik responden menurut lamanya bekerja yaitu pengelompokan responden dengan lama bekerja 0 sampai 15 tahun yaitu 37 orang dan 16 sampai 30 tahun yaitu 13 orang. Untuk mengetahui tingkat proporsi lamanya bekerja, dapat disajikan melalui tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Lama Bekerja Responden**

<b>Waktu kerja (Tahun)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
0-15	37	74%
16-30	13	26%
Total	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang bekerja 0 sampai 15 tahun sebanyak 37 orang (74%), dan 16 sampai 30 tahun sebanyak 13 orang (26%). Data tersebut menunjukkan bahwa lamanya bekerja responden didominasi oleh responden yang bekerja 0 sampai 15 tahun.

1. Klasifikasi Skor Jawaban Variabel Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

**Tabel 4.5**  
**Klasifikasi Skor Jawaban Responden mengenai Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah (Variabel X)**

Indikator	No. Prty.	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
Penerapan basis akrual untuk penfakuan aset, kewajiban, dan ekuitas	1	236	250	94,4%	Sangat Efektif
Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, biaya dan pembiayaan	2	225	250	90%	Sangat Efektif
Penilaian aset dan penilaian kewajiban	3	231	250	92,4%	Sangat Efektif
Penyajian wajar peristiwa lain	4	212	250	84,8%	Sangat Efektif
Periode pelaporan	5	227	250	90,8%	Sangat Efektif
Penerapan metode Akuntansi	6	232	250	92,8%	Sangat Efektif
Kelengkapan informasi laporan Keuangan	7	232	250	92,8%	Sangat Efektif
Penyajian wajar laporan keuangan	8	233	250	93,2%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2019

**Rentang Pengklarifikasian**

Sangat Tidak Efektif : 20,00% - 36,00%

Kurang Efektif : 36,01% - 52,00 %

Cukup Efektif : 52,01% - 68,00%

Efektif : 68,01% - 84,01%

Sangat Efektif : 84,02% - 100%

(Sumber: Umi Narimawati, 2007: 84 – 85)

Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata variabel X sebesar 228,5. (91,4%) Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel X tersebut berada pada interval 84,02% - 100%

yang berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk dalam kategori "Sangat Efektif". Standar Akuntansi Pemerintah yang masuk kategori sangat efektif akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik oleh karena Standar Akuntansi Pemerintah sangat erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan/ instansi.

## 2. Klasifikasi Skor Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

**Tabel 4.6**  
**Klasifikasi Skor Jawaban Responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Y)**

Indikator	No. Prty.	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
Laporan Keuangan memiliki umpan balik	1	211	250	84,4%	Sangat Berkualitas
Laporan keuangan memiliki manfaat prediktif	2	220	250	88%	Sangat Berkualitas
Penyajian laporan keuangan tepat waktu	3	227	250	90,8%	Sangat Berkualitas
Penyajian laporan keuangan lengkap	4	236	250	94,4%	Sangat Berkualitas
Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material	5	230	250	92%	Sangat Berkualitas

Penyajian laporan keuangan Jujur dan dapat diverifikasi	6	233	250	93,2%	Sangat Berkualitas
Laporan keuangan mengandung informasi yang memadai	7	219	250	87,6%	Sangat Berkualitas
Laporan keuangan dapat di bandingkan dengan priode sebelumnya	8	233	250	93,2%	Sangat Berkualitas

Sumber: Data Diolah,2019

### Rentang Pengklarifikasian

Sangat Tidak Berkualitas : 20,00% - 36,00%

Kurang Berkualitas : 36,01% - 52,00 %

Cukup Berkualitas : 52,01% - 68,00%

Berkualitas : 68,01% - 84,01%

Sangat Berkualitas : 84,02% - 100%

(Sumber: Umi Narimawati,2007:84 – 85)

Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata variabel Y sebesar 235,12 (94,05%). Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval 84,02%-100% yang berarti kualitas laporan keuangan termasuk dalam kategori "Sangat Berkualitas". Laporan keuangan yang sangat berkualitas tentu memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan suatu perusahaan atau instansi informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.



## 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### a. Uji Validitas

Hasil yang ditunjukkan dari uji validitas ini akan menggambarkan valid atau tidaknya instrument yang diajukan di dalam kuesioner. Instrumen pertanyaan yang diajukan dalam koesioner harus bersifat valid karena pertanyaan itu harus mencerminkan variabel yang ingin diteliti. Hasil uji validitas dari setiap variabel di dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas**

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0,720	0,354	Valid
X2	0,760	0,354	Valid
X3	0,895	0,354	Valid
X4	0,440	0,354	Valid
X5	0,799	0,354	Valid
X6	0,781	0,354	Valid
X7	0,858	0,354	Valid
X8	0,824	0,354	Valid
Y1	0,535	0,354	Valid
Y2	0,691	0,354	Valid
Y3	0,591	0,354	Valid
Y4	0,806	0,354	Valid
Y5	0,799	0,354	Valid
Y6	0,835	0,354	Valid
Y7	0,623	0,354	Valid
Y8	0,745	0,354	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

Untuk mengetahui tingkat validitas suatu data, maka besarnya nilai r hitung > r tabel. r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,354 karena jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50, untuk mendapat r tabel dilakukan derajat kebebasan (*degree of freedom-df*) diperoleh dari jumlah sampel atau

responden dikurangi 2 ( $df = N - 2$ ). Dengan demikian melalui proses statistik didapat  $r$  tabel sebesar 0,354.

### b. Uji Reliabilitas

Hasil yang ditunjukkan dari uji reliabilitas akan menunjukkan suatu data memiliki keandalan atau jawaban responden konsisten dengan pertanyaan yang diajukan. Hasil uji reliabilitas dari penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
X	0,889	0,6	Reliable
Y	0,851	0,6	Reliable

Sumber: Data Diolah, 2019

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu data maka besarnya koefisien Alpha Cronbach  $> 0,6$ . Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel di dalam penelitian ini bersifat reliable karena koefisien Cronbach Alpha  $> 0,6$

## 2. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Uji Regresi Linear Sederhana Yang Meliputi Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Dan Uji-T.

### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Berikut hasil output dari metode statistik yang diolah melalui *software SPSS 24.0 for windows*

**Tabel 4.9**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model Summary**

Model Summary							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	Big. F Change
1	.860 <sup>a</sup>	.739	.734	1.45920	.739	136.110	.000
a. Predictors: (Constant), X							
b. Dependent Variable: Y							

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9, nilai R sebesar 0,739 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan variabel Y (kualitas laporan keuangan) sebesar 73,9% dan selebihnya 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal auditor, dan lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (X) secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil output yang dihasilkan dari metode statistik yang diolah melalui *software SPSS 24.0 for windows*.

**Tabel 4.10**  
**Uji-t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.696	2.361		3.682	.001
	X	.751	.064	.860	11.667	.000

a. Dependent Variable: Y

*Sumber : Data diolah, 2019*

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,696 + 0,751$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta ( 0) adalah sebesar 8,696. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mempengaruhi, maka Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 8,696. Dari hasil uji regresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai koefisien Standar Akuntansi Pemerintahan (X) sebesar 0,751 atau 75,1% berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dimana t-hitung lebih besar dari t tabel ( $11,667 > 0,2306$ ) dengan tingkat sig lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah naik sebesar 0,751 dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan daerah

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah sangat efektif. Hal ini diketahui sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dikaitkan dengan kategori yang telah ditentukan, yang berarti Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah masuk dalam kategori "Sangat Efektif " Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah dikatakan Sangat

Efektif apabila tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dalam rangka Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sudah Baik.

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan instansi pemerintah yang berada dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah berkualitas. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dikaitkan dengan kategori yang telah ditentukan yang berarti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara masuk dalam kriteria "Sangat Berkualitas". Laporan keuangan pada dasarnya harus memiliki kualitas informasi atau karakteristik kualitas agar dapat memberikan informasi yang berkualitas tinggi bagi para pemakainya seperti Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam Laporan Keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai Relevan. agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal informasi memiliki kualitas andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai

penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan. Dapat dibandingkan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat di perbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Laporan Keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah baik karena sudah masuk dalam kategori berkualitas.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan antara Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel X terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel Y menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip Akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan Hasil evaluasi ditunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah efektif hal tersebut ditandai dengan penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah juga telah mendukung perubahan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan adanya regulasi yang jelas yakni sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengelola keuangan. dan dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Selain itu dari Hasil Penelitian Eka Danofi (2013:80) Mengemukakan bahwa adanya pengaruh atas standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. artinya semakin baik pemahaman serta penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintahan pusat dan daerah, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki Pengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu hasil dari penelitian yang saya lakukan juga sama dengan yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui observasi dan penyebaran kuesioner, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

Keefektifan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan. Dengan demikian informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran pada seluruh instansi pemerintahan khususnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

1. Untuk terus memperhatikan pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan khususnya pegawai yang berperan langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Teori maupun praktek yang telah menggunakan sistem perangkat lunak (*software*) dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dibuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

3. Untuk mengatur kualitas laporan keuangan pemerintah mampu menyediakan standar akuntansi terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Astalia Pratiwi<sup>1</sup> Jullie J. Sondakh<sup>2</sup> Lintje Kalangi<sup>3</sup>, 2014 *Analisis Penerapan Sak Tetap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan* (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5498>)
- Bambang, Prasetyo Dan Jannah, Lina Miftahul. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Dhedy Triwardana, 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan System Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompotensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)* Vol. 4 No. 1
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. (<http://repository.unhas.ac.id> Diakses 31 Oktober 2017).
- Nurul Fahmi, 2018 . *Pengaruh Evekifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Muhammadiyah Makassar*
- Purwaniati Nugraheni Imam Subaweh, 2008 *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (<https://www.neliti.com/id/publications/5955/Pengaruh-Penerapan-Standar-Akuntansi-Pemerintahan-Terhadap-Kualitas-Laporan-Keua>)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan-Jakarta:Salemba empat,2012
- Pamungkas, Bambang . 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Jilid 2 . Bogor : Kesatuan Pers
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Mitra Wacana Media*
- Sujarweni,V. Wiratna, 2015. *Akuntansi sektor publik : pustaka baru press Yogyakarta*

Sudaryo, Yoyo. Dkk. 2017. Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Ed.1. Andi: Yogyakarta

Sangadji, Etta Mammang Dan Sopiah. 2010. Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi

*Sumber: Umi Narimawati,2007:84 – 85*

<https://Fakhrurazypi.Wordpress.Com/Tag/Standar-Akuntansi-Pemerintahan/>

<http://Www.Ssbelajar.Net/2012/04/Kualitas-Laporan-Keuangan.Html?M=1>



## RIWAYAT HIDUP



Rahmi Awaliyah panggilan Rahmi lahir di desa Cendana Putih pada tanggal 28 Agustus 1998 dari pasangan suami istri Bapak Alii Misbahuddin dan Ibu Sekinah, Penulis adalah anak Pertama dari 3 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumahan Lj.land2 Kecamatan Pallangga Desa Bontoalla Gowa.

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 120 Gontang Lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Mappedeceng Lulus tahun 2012, SMA Negeri 9 Luwu Utara Lulus tahun 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta dengan memilih Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengalaman organisasi dijenjang perguruan tinggi yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMANSI) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.